

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (RENSTRA KKP 2020) yang dilandasi dengan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2020-2024) untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai basis pembangunan nasional, maka ditetapkan kriteria dalam penetapan Lumbung Ikan Nasional yakni kawasan yang mencakup lebih dari dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), memiliki potensi sumber daya ikan nasional lebih dari 20%, serta memiliki daerah pelayanan produksi perikanan secara nasional. Dengan demikian Provinsi Maluku merupakan salah satu Provinsi yang ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini telah mempersiapkan Lumbung Ikan Nasional agar dapat beroperasi pada tahun 2023 mendatang, hal tersebut dibuktikan dengan rapat koordinasi dan kunjungan langsung bersama pemerintah daerah setempat pada (05 Februari 2021).

Pada prinsipnya Lumbung Ikan Nasional dijadikan sebagai kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dinamisnya kebijakan ketahanan pangan dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional dengan tujuan menjamin ketersediaan stok sumber daya ikan yang berkelanjutan, mewujudkan peningkatan ekonomi negara, daerah, dan masyarakat, serta mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku) dalam webinarnya pada 30 Januari 2021. Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kunjungannya ke Provinsi Maluku pada Februari 2021 menyatakan bahwa pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku diharapkan dapat menjadikan Maluku sebagai pusat ekonomi kelautan yang baru karena merupakan salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di Indonesia. Setiap tahun  $\pm 4,6$  juta ton ikan yang dihasilkan sehingga membuat Maluku berkontribusi besar dalam produksi ikan nasional

yakni sebesar 37% per tahun, potensi tersebut berasal dari 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP 714, WPP715, dan WPP 718. Pembangunan Lumbung Ikan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan dan kelautan yang dihasilkan dari perairan laut sekitar baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang mampu menyuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional serta menjadi eksportir utama komoditas perikanan di dunia mengingat krisis ketersediaan akan kebutuhan bahan pangan yang selalu menghantui dunia selama beberapa tahun terakhir. Tujuan besar ini muncul karena didukung dengan ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia. Maka dengan ditetapkannya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional menjadi peluang sekaligus tantangan baik kepada pemerintah, akademisi maupun masyarakat pada umumnya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan yang dimiliki secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Namun perlu disadari bahwa dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang muncul baik dari pra produksi, produksi, maupun distribusi.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014, di Provinsi Maluku terletak 11 Kabupaten/Kota yang mencakup 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yaitu WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau, serta WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur. Dari 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) tersebut, WPP 718 merupakan lokasi paling produktif dalam sektor perikanan tangkap (DJPT KKP, 2010). Salah satu Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya Lumbung Ikan Nasional di Maluku adalah Kabupaten Kepulauan Aru dengan Kota Dobo sebagai Ibu Kota Kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, Kota Dobo merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru yang terletak di Pulau Wamar dan didominasi oleh perairan laut dengan keanekaragaman sumber daya hayati yang sangat mendominasi pendapatan regional. Selama ini Dobo dikenal sebagai penghasil mutiara berkualitas tinggi baik yang dihasilkan dari hasil perikanan tangkap maupun

perikanan budidaya, produksi mutiara di Dobo Kepulauan Aru pada tahun 2017 sebesar 0,13 ton, 2018 sebesar 0,16 ton, dan 2019 sebesar 0,13 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kep Aru 2020). Adapun potensi sumber daya kelautan dan perikanan lainnya yang sangat besar terdiri dari ikan, lobster, teripang, rumput laut, dan lain sebagainya (BPS Kab Kep Aru, 2020).

Peran strategis Kabupaten Kepulauan Aru dalam mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional memberikan peluang dan tantangan besar karena beberapa tahun terakhir produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru dinilai belum optimal baik secara kualitas maupun kuantitas (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Kep Aru 2020). Hal tersebut tentu saja memiliki dampak terhadap keberlanjutan Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku, pasalnya konsistensi estimasi target produksi perikanan yang ditentukan dalam rapat koordinasi pada (05 Februari 2021) harus mencapai 750.000 ton/tahun. Sehingga pemerintah daerah berencana meningkatkan produktivitas perikanan tersebut, namun dalam implementasi peningkatan tersebut perlu disusun strategi tertentu. Oleh sebab itu, perlu adanya *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai sistem pendukung keputusan mengenai upaya peningkatan produksi perikanan tangkap yang berorientasi pada pengelolaan perikanan berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

- 1) Variabel apa saja yang dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap di PPP Dobo Kabupaten Kepulauan Aru?
- 2) Bagaimana menentukan variabel prioritas untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di PPP Dobo Kabupaten Kepulauan Aru dalam mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menentukan variabel untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di PPP Dobo Kabupaten Kepulauan Aru;

- 2) Menganalisis dan menetapkan variabel prioritas untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di PPP Dobo Kabupaten Kepulauan Aru dalam mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

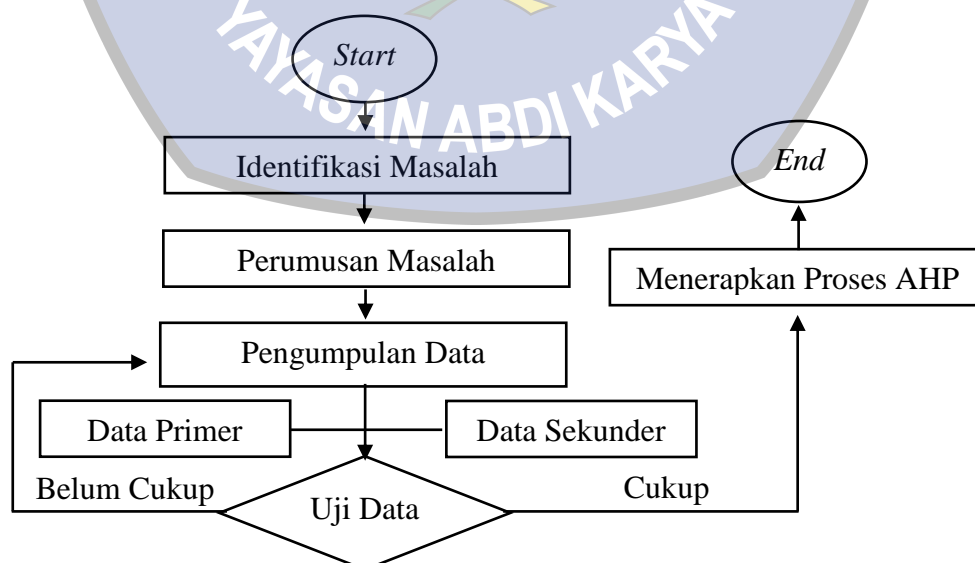
Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi penulis, kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam meningkatkan kepekaan peneliti terhadap masalah-masalah yang muncul dalam sektor perikanan dan kelautan khususnya terkait bidang perikanan tangkap.
- 2) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap serta mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dasar bagi penelitian lanjutan dibidang terkait.

#### 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diperlukan sebagai alur dalam penelitian guna mencapai tujuan yang ditetapkan secara sistematis dan terstruktur. Kerangka pemikiran terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. *Flowchart* Penelitian